



ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH (SIMBADA) PADA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA

¹Rika Sapriyani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

rikasapriyani0@gmail.com

²Laylan Syafina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

laylansyafina@uinsu.ac.id

Abstrak

Suatu organisasi sudah diwajibkan mengembangkan sistem informasi yang dimiliki yang digunakan untuk melayani kepentingan publik. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah salah satu upaya yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang handal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak dan kendala terkait penggunaan aplikasi SIMBADA di Dinas Bina Marga Dan Bina Kontruksi Pemprov. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini ialah terdapat dampak negatif dan positif terkait penggunaan aplikasi SIMBADA serta kendala dalam aplikasi tersebut yang belum mampu untuk menginput bilangan berkoma pada satuan barang/aset, sehingga pada proses penginputannya berlakulah pembulatan angka pada bilangan berkoma tersebut. Dimana jika terjadi *miscommunication* antara staf/ASN yang melakukan perjalanan dinas dengan bendahara pengeluaran pembantu serta pengurus barang pembantu (yang menginput data ke aplikasi SIMBADA) maka akan terjadi perbedaan pencatatan sampai ke buku kas umum. Untuk itu diperlukan penyempurnaan aplikasi SIMBADA secara berkala serta menghilangkan ataupun meminimalisir *miscommunication* antara bendahara pengeluaran pembantu dengan pengurus barang pembantu supaya tidak terjadi perbedaan antara catatan pengeluaran dengan pengadaan BBM dengan aplikasi SIMBADA.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Barang Milik Daerah

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan sistem informasi di era globalisasi sekarang ini tidak dapat dihindarkan bagi suatu elemen untuk melakukan tugasnya. Kelangsungan kehidupan berorganisasi saat ini sangat sulit tanpa pemanfaatan inovasi sistem informasi yang terbaru. Pesatnya perkembangan dunia saat ini menjadikan teknologi informasi mempunyai peranan yang sangat vital. Sistem informasi dibuat oleh entitas untuk mengindahkan kepentingan penggunanya. Sejalan dengan hal tersebut setiap entitas dituntut untuk lebih terbuka agar memperoleh keuntungan dari kemajuan teknologi. Sistem informasi sangat penting untuk melaksanakan operasi sehari-hari dan mencapai tujuan bisnis serta sasaran utama (Anisya dan Iwan 2015 hlm. 239-240).

Menurut Anisya dan Iwan (2015 hal.240) sangat penting mengembangkan sistem informasi terlepas dari organisasi yang melayani kepentingan publik. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan kerangka data administrasi yang handal. Selain itu, pemanfaatan aplikasi kerangka program akan membuat pekerjaan otoritas publik lebih sederhana dan lebih produktif. Selain itu, informasi dan data akan diperkenalkan dengan lebih efisien dan pasti. Seperti halnya kebutuhan sistem informasi di sektor non-pemerintah, kebutuhan sistem informasi di pemerintahan dan tujuan yang dicapai di sektor negara mulai menggunakan sistem informasi berbasis PC, termasuk manajemen aset daerah. Oleh karena itu, latihan pengendalian sebagai sistem informasi dewan merupakan latihan yang wajib dilaksanakan untuk menjamin bahwa penerapan sistem informasi yang melibatkan Instansi Pemerintah sebagai perangkat administrasi moneter dapat memberikan kepastian pengendalian intern yang memuaskan.

Penggunaan Sistem Informasi Barang Daerah pastinya membutuhkan wawasan yang mendalam tentang perancangan sistem informasi yang tepat dari pengguna dan kebutuhan untuk perbaikan secara berkala untuk mencapai tujuan penggunaan aplikasi ini. Sistem informasi dibuat untuk mengingat sistem informasi manual yang telah berjalan sebenarnya dan dipercaya bahwa dengan sistem informasi yang dimodernisasi, kegiatan fungsional suatu asosiasi akan lebih produktif namun tidak akan mengurangi kelangsungan sistem informasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang pasti

dan prosedural sebagai perangkat penilaian terhadap aplikasi SIMBADA yang digunakan di Dinas Bina Marga dan Bina Dan Bina Kontruksi Pemprov.

KAJIAN TEORI

1. Administrasi Publik

Administrasi menurut ahli dipaparkan sebagai berikut: Simon berpendapat bahwa administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dimock menyatakan bahwa, “administrasi merupakan pengetahuan yang berkonsentrasi pada apa yang dibutuhkan individu lewat pemerintah, dan bagaimana mereka mendapatkannya Pasolong, (2007)). Administrasi memprioritaskan tentang bagian penting dari strategi dan metodologi serta tata cara manajemen.

2. Peran Administrasi Publik

Peran dari administrasi publik Menurut Widjaja (2005, p.4) di LN. Rizqi et al (2012) “Peran administrasi publik tidak cukup hanya sebatas gagasan dan hipotesis, namun juga dapat membuat suatu disiplin ilmu (ilmu otoritatif) yang dapat mengatasi persoalan-persoalan yang berbelit-belit, terutama dalam pelaksanaan penyelenggaraan kemandirian daerah”. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adminitrasi publik sangat fundamental dalam otonomi daerah yang menitikberatkan pada dukungan terbuka dan dukungan nasional sebagai cerminan negara demokrasi.

3. Barang/Aset Milik Daerah

Barang/Aset Milik Daerah oleh Mahmudi (2010, hal.146) dalam LN. Rizqi dkk (2012) pada umumnya merupakan sumber daya lokal baik untuk pembelian maupun perolehan yang menjadi biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari perolehan otentik lainnya yang bergerak maupun tidak dan merupakan satuan-satuan tertentu yang dapat disurvei, dihitung, ditaksir atau ditimbang termasuk makhluk dan tumbuhan dengan pengecualian uang tunai dan perlindungan surat berharga lainnya.

a. Dasar-Dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang/aset milik daerah berperan penting untuk penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan masyarakat yang wajib diawasi, sehingga dapat memahami penatausahaan barang/aset milik daerah dengan melihat azas-azas yang telah diatur pada Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang dasar fungsional, dasar kepastian hukum, dasar transparansi, dasar efisiensi, dasar akuntabilitas dan dasar kepastian nilai.

b. Pilar-pilar Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

Pilar dasar yang mesti dilihat pada manajemen aset/barang milik daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah patut melaksanakan manajemen aset dari tahap penataan sampai tahap penyisihan aset. Semua tahapan ini wajib terdokumentasi dengan benar (Mahmudi 2010, hlm.157-158).

4. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah penggunaan sistem informasi di dalam yang digunakan untuk mendorong informasi yang diperlukan oleh seluruh lapisan manajemen dalam organisasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Cushing yang dikutip oleh Jogyanto, dalam LN. Rizqi et al (2012 p. 99) SIM adalah sistem yang dipakai untuk mendokumentasikan atau mencatat bermacam-macam aset manusia maupun modal dalam sebuah organisasi yang berkewajiban untuk mengumpulkan dan menangani informasi untuk memberikan data berharga bagi semua tingkatan manajemen organisasi.

Seperti yang ditunjukkan oleh Davis di LN. Rizqi et al (2012 hlm. 99) "Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang berguna untuk menyediakan data yang dibutuhkan bagi semua organisasi dalam menjalankan tugasnya".

5. Peran Sistem Informasi Manajemen

Beberapa fungsi sistem informasi menurut Jogyanto dikutip LN Rizqi (2012 hlm. 99) antara lain:

- a. Bekerja pada keterbukaan informasi yang diperkenalkan dengan cara yang tepat dan tepat untuk pengguna, tanpa memerlukan adanya sistem informasi perantara.
- b. Untuk meningkatkan operasi strategi aset atau barang milik daerah agar lebih baik..
- c. Mengenal berbagai keperluan akan kapasitas penyokong system informasi.

- d. Menentukan investasi yang akan dituju pada system informasi.
- e. Organisasi memakai sistem informasi untuk mengatur pertukaran, meminimalisir beban, dan memperoleh pendapatan sebagai salah satu elemen atau kontrol.

6. Pemanfaatan SIMBADA

Seperti yang diungkapkan Dewi, dikutip oleh Khoirul (2018 hlm. 23) menyatakan bahwa SIMBADA merupakan suatu sistem administrasi keuangan berlandaskan inovasi teknologi yang dapat meringankan pemerintah daerah dalam menciptakan data keuangan yang aplikatif, likuid, tepat, komplit dan bisa dikonfirmasi.

Sesuai Djadja dalam Anisya dan Iwan (2015 hal. 246) mencirikan SIMBADA sebagai aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana motivasi di balik peningkatan aplikasi ini adalah untuk memacu jalannya perubahan administrasi keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pegawai pemerintah daerah yang berlatar belakang akuntansi, dan pemerintah sekitar yang berjuang untuk menggabungkan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan kebijakan terkait. Menurut Djadja (2009:161), penerapan SIMBADA adalah suatu program yang dibuat dengan menggunakan pendataan.

Aplikasi SIMBADA telah terhubung mulai dari kapasitas perencanaan, fungsi penatausahaan pemerintahan daerah hingga kemampuan akuntansi dan perincian. Jadi dalam setiap pelaksanaan sistem berbasis PC, penting untuk menyebutkan pihak yang bertindak sebagai pengawas. Direksi memiliki kapasitas untuk mengawasi basis informasi, mengawasi aplikasi (pemrograman) dan peralatan pada masing-masing SKPD yang dipimpinnya adalah pengguna anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai user terakhir dari aplikasi SIMABADA (Indonesia, hal. 3). Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa ringkasan fiskal siap memberikan data keuangan yang terkait mengenai laporan neraca dan semua pertukaran yang dilaksanakan dengan mengumumkan substansi selama satu tahun pelaporan. Laporan keuangan yang dibuat dari aplikasi SIMBADA sebagian besar digunakan untuk melihat pengakuan pendapatan, penggunaan, pemindahan, dan dukungan dengan rencana pengeluaran yang telah

ditentukan sebelumnya, survei keadaan keuangan, menilai kelayakan dan kemampuan bahan pengungkapan, dan membantu dengan memutuskan konsistensinya dengan peraturan dan pedoman.

METODE PENELITIAN

Seperti yang ditunjukkan oleh Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong dalam LN Rizqi (2012 hlm. 101) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif sebagai informasi yang tersusun dari data-data tertulis maupun lisan dari individu dan cara berperilaku yang nyata. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu pada bendahara pengeluaran pembantu dan pengurus barang pembantu bidang pemeliharaan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov. Data yang didapatkan dari dokumen yang relevan dengan pembahasan, literatur, dan sumber lainnya yang terkait merupakan data sekunder. Wawancara dan dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan *interactive model of analysis* yang dibuat oleh Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2009, h.196) melalui tiga fase, yaitu:

1. Reduksi Data

Langkah pertama dalam teknik analisis data ialah mereduksi data. Mereduksi data bermakna menyimpulkan serta memilih informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan mengeliminasi data-data yang tidak dibutuhkan. Jadi cenderung ditentukan bahwa informasi yang ditangani umumnya informasi yang diingat untuk tingkat eksplorasi. Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik itu data primer seperti bukti ilmiah terkait aplikasi SIMBADA, laporan catatan pengeluaran, serta data sekunder yang didapat melalui media perantara, misalnya, akses web ke situs, buku, buku jurnal, dan berbagai media untuk memberikan data. Data tambahan tentang masalah yang diteliti.

2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya ialah penyajian data yang dilakukan untuk melihat gambaran atas data yang didapatkan secara keseluruhan dengan tujuan memudahkan peneliti untuk menganalisis data. Pada tahap ini peneliti berupaya menguraikan data yang ada terhadap permasalahan yang dianalisis dengan memakai tabel tunggal. Langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah diminta kepada pihak perusahaan yang kemudian disatukan dalam bentuk tabel.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah fase terakhir dari tahap analisis data. Pada bagian ini, peneliti membuat kesimpulan dari informasi atau data-data yang telah disajikan. Tindakan ini diharapkan dapat melacak signifikansi masalah yang diteliti. Langkah yang saya ambil dalam mendapatkan kesimpulan dari teknik analisis data ialah dengan cara mereduksi data lalu memilih hal yang paling utama dan peneliti fokus pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang berlebihan. Hal-hal yang penting dalam bagian teknik analisis data ialah yang terkait pada bagian yang ada didalam teknik analisis data dan pada tabel tunggal yang sudah diuraikan pada lampiran berikutnya, dan membuang hal yang tidak ada kaitannya pada bagian teknik analisis data. Setelah menguraikan permasalahan yang terdapat dari data-data maupun dokumen yang telah diberikan para informan, kemudian peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang diuraikan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dampak dari adanya SIMBADA

Penggunaan sistem informasi manajemen harus mempengaruhi pengguna sistem informasi yang berdampak baik maupun yang buruk. Serta efek dari pelaksanaan SIMBADA selama waktu yang dihabiskan untuk mengendalikan sumber daya atau barang milik daerah. Adapun sebagian manfaat dan peranan dari sistem informasi menurut Jogyanto (2010, p.18) diantaranya:

- a. Bekerja pada keterbukaan informasi yang diperkenalkan dengan cara yang tepat dan tepat untuk pengguna, tanpa memerlukan adanya sistem informasi perantara.
- b. Meningkatkan operasi perencanaan barang milik daerah atau asset yang efektif.
- c. Mengenali berbagai keperluan akan kapasitas penyokong system informasi.
- d. Menentukan investasi yang akan dituju pada system informasi.
- e. Entitas memakai sistem informasi untuk mengatur pertukaran, meminimalisir beban, dan memperoleh keuntungan sebagai suatu elemen atau kontrol.

Adapun resolusi atas penjelasan diatas yaitu SIMBADA tidak jarang juga mempengaruhi cara paling umum untuk mengarahkan sumber daya atau barang milik daerah menjadi hal dipertimbangkan, efek positif dari aplikasi SIMBADA adalah untuk bekerja dengan administrasi sumber daya teritorial atau properti dalam siklus administrasi atau pencatatan informasi.

Namun ternyata ada akibat yang merugikan dari aplikasi SIMBADA, khususnya tidak jarang pimpinan mempercayai dan bergantung pada informasi yang ada di aplikasi SIMBADA, serta tidak langsung mengkonfirmasi keberadaan informasi tersebut di dalam aplikasi SIMBADA. Masing-masing SKPD dan di lapangan, sehingga terkadang terjadi disparitas antara informasi di aplikasi SIMBADA dengan informasi di lapangan. Pada dasarnya sistem informasi adalah sebuah metode yang memudahkan suatu entitas dalam siklus dinamis secara cepat. Sesuai Leitch dan Davis dalam Jogyanto (2005, p.11) bahwa Sistem Informasi yaitu kerangka kerja di dalam suatu asosiasi yang menyatukan kebutuhan penanganan pertukaran sehari-hari, menegakkan tugas, merupakan kegiatan administratif dan vital dari suatu asosiasi dan memberikan laporan-laporan yang diperlukan pada pertemuan eksternal yang pasti.

2. Penggunaan Aplikasi SIMBADA pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Pemprov

Keunggulan yang kompetitif dapat dicapai dengan mudah ketika organisasi mampu memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Begitu pula dalam lingkup pemerintahan, informasi telah menjadi *intangible asset*, yang jika dimanfaatkan dengan dengan maksimal akan mampu mengembangkan kinerja pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah mulai mendukung teknologi informasi agar mampu menjadi media untuk

mengelola pemakaian informasi secara efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan aplikasi sistem informasi keuangan menggunakan komputer oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu penyusunan LKPD yakni aplikasi SIMBADA. Dengan aplikasi ini dapat memicu proses perubahan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMBADA telah terhubung mulai dari kegiatan penganggaran, kegiatan penatausahaan keuangan daerah, sampai kegiatan pencatatan dan pelaporan. Atas dasar tersebut, penerapan sistem berbasis komputer, memerlukan satu pihak sebagai administrator yang akan menjalankan database, aplikasi (software) dan hardware.

Untuk menguatkan fenomena yang terjadi, peneliti mendapatkan bukti ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIMBADA terkait kasus yang diteliti dapat dilihat pada tabel yang telah dipaparkan di bawah ini.

Tabel 1.1
Tabel Keterangan Bukti Ilmiah

Keterangan	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga
1. Pencatatan/input data belanja BBM/Gas pada aplikasi SIMBADA	153 ltr	7.650	1,168,691
2. Catatan penerimaan dan pengeluaran belanja BBM/Gas	152.8 ltr	7.650	1,168,690.50
3. Rincian pemakaian BBM	152.77 ltr	7.650	1,168,700
4. Kwitansi belanja BBM	152.77 ltr	7.650	1,168,700
5. Buku Kas Umum (no. urut 29/06/pg)	152.77 ltr	7.650	1,168,700

Dari pemaparan tabel di atas, bisa kita lihat pada keterangan-1, tercatat jumlah belanja BBM yang diinput pada aplikasi SIMBADA sebesar 153 liter dengan total harga senilai Rp 1,168,691. Sementara jika kita lihat di Catatan penerimaan dan pengeluaran belanja BBM/Gas pada keterangan-2 jumlah belanja BBM tercatat sebesar 152.8 liter dengan total harga senilai Rp 1,168,690.50. Kemudian ketika dicatat di kwitansi belanja

BBM dan buku kas umum pada keterangan-5 dan -6 berlaku pembulatan angka pada jumlah harga yakni senilai Rp 1,168,700 namun total liter tidak berlaku pembulatan angka yakni senilai 152.77 liter.

Berdasarkan hasil penyajian data, analisis dan pembahasan, maka dapat dilihat bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara telah diterapkan dengan baik secara administratif, namun keakuratan terkait informasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif. Permasalahan yang dialami dari pelaksana aplikasi SIMBADA ini yaitu belum mampu untuk menginput bilangan berkoma pada satuan barang/aset, sehingga pada proses penginputannya berlakulah pembulatan angka pada bilangan berkoma tersebut. Dimana hal ini tentunya akan menyebabkan perbedaan pencatatan antara aplikasi SIMBADA dengan catatan pengeluaran dalam pengadaan BBM.

Adapun solusi dari permasalahan diatas ialah diperlukannya penyempurnaan aplikasi SIMBADA secara berkala serta menghilangkan *miscommunication* antara bendahara pengeluaran pembantu dengan pengurus barang pembantu supaya tidak terjadi perbedaan antara catatan pengeluaran dalam pengadaan BBM dengan aplikasi SIMBADA.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Keunggulan yang kompetitif dapat dicapai dengan mudah ketika organisasi mampu memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Begitu pula dalam lingkup pemerintahan, informasi telah menjadi *intangible asset*, yang jika dimanfaatkan dengan dengan maksimal akan mampu mengembangkan kinerja pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah mulai mendukung teknologi informasi agar mampu menjadi media untuk mengelola pemakaian informasi secara efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan aplikasi sistem informasi keuangan menggunakan komputer oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu penyusunan LKPD yakni aplikasi SIMBADA. Dengan aplikasi ini dapat memicu proses perubahan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMBADA telah terhubung mulai dari kegiatan penganggaran, kegiatan penatausahaan keuangan daerah.

Tentunya penerapan sistem akan memberikan dampak yang baik ataupun kurang baik. Dampak baik dari SIMBADA tersebut ialah untuk memudahkan pengelolaan aset dan barang milik daerah dalam proses manajemen atau pencatatan data. Namun disisi lain terdapat dampak kurang baik yang didapat dimana terkadang pengelola terlalu bergantung pada data-data yang ada pada SIMBADA dan tidak mengecek kembali keadaan di SKPD dan di lapangan, sehingga terjadi ketidaksesuaian.

Berdasarkan hasil penyajian data, analisis dan pembahasan, maka dapat dilihat bahwa penggunaan aplikasi SIMBADA di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara telah diterapkan dengan baik secara administratif, namun keakuratan terkait informasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif. Permasalahan yang dialami dari pelaksana aplikasi SIMBADA ini yaitu belum mampu untuk menginput bilangan berkoma pada satuan barang/aset, sehingga pada proses penginputannya berlakulah pembulatan angka pada bilangan berkoma tersebut. Dimana hal ini tentunya akan menyebabkan perbedaan pencatatan antara aplikasi SIMBADA dengan catatan pengeluaran dalam pengadaan BBM.

Adapun solusi dari permasalahan diatas ialah diperlukannya penyempurnaan aplikasi SIMBADA secara berkala serta menghilangkan *miscommunication* antara bendahara pengeluaran pembantu dengan pengurus barang pembantu supaya tidak terjadi perbedaan antara catatan pengeluaran dalam pengadaan BBM dengan aplikasi SIMBADA.

2. Saran

Berkaitan dengan kasus yang diangkat peneliti, maka diharapkan kepada staf/ASN yang melakukan perjalanan dinas agar membuat laporan pemakaian BBM/Gas disesuaikan dengan sistem aplikasi SIMBADA agar tidak terjadi perbedaan jumlah antara bukti pengeluaran dengan aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Wulandari, A. S., & Putra, I. S. (2015). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Dengan Metode Technology Acceptance Model Pada Pemerintah Kabupaten Blitar. *Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 2 (2), 239–258.

- Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan spiritual. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2014). *Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rambe, K. A. (2018). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) pada Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan*, 1-89.
- Rizqi, L. N., Domai, T., & Wachid, A. (2016). *Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) Di Kabupaten Malang*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 93–101.
- Jogiyanto. (2005). *Sistem Teknologi Informasi : Pendekatan Terintegrasi : Konsep Dasar, Teknologi Aplikasi, Pengembangan Dan Pengelolaan* (3rd ed.). CV Andi Offset.
- Pasolong. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Widjaja. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- <http://binamarga.sumutprov.go.id>
- Anisya, & Iwan. (2015). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Dengan Metode Technology Acceptance Model Pada Pemerintah Kabupaten Blitar. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 2(2).